

PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PTKIN

(Studi terhadap Motivasi Spiritual Keagamaan)

Kisbiyanto

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
kisbiyanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang memotivasi individu untuk ikut berpartisipasi mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Informan dalam penelitian ini adalah orangtua mahasiswa yang juga sebagai bagian dari masyarakat. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat yang beragama Islam mempunyai cara pandang dan pertimbangan tertentu untuk mengikuti pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan *mix-method* dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik *snow ball sampling* dengan menyebar angket dan survei langsung pada orangtua mahasiswa. Faktor-faktor yang memotivasi partisipasi masyarakat untuk *study* di perguruan tinggi, khususnya di Jurusan Tarbiyah, menunjukkan bahwa Perguruan tinggi yang secara spesifik mengajarkan *Islamic studies* menjadi pertimbangan utama sekaligus magnet bagi individu untuk mengikuti jenjang perguruan tinggi. Disamping itu, pertimbangan melaksanakan perintah agama dan menjadi sarjana pendidikan Islam merupakan motivasi tertinggi dibanding motivasi lainnya. Faktor melaksanakan *kewajiban menuntut ilmu agama* dan belajar setinggi-tingginya juga menjadi faktor terpenting yang kesemuanya merupakan potret motivasi spiritual keagamaan.

Kata Kunci: *motivasi, spiritual, partisipasi, pendidikan tinggi*

Abstract

PUBLIC PARTICIPATION ON EDUCATION IN STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES (STUDY OF THE RELIGIOUS SPIRITUAL MOTIVATION). The purpose of this research was to know what factors which motivate individuals to participate the education in Islamic religious College. Informants in this study were the students' parents as well as part of the community. The background of this research is that the Muslim community has certain considerations and viewpoints to participate in higher education. This study used mix methods by using quantitative-qualitative approach. The data were obtained using the technique of snow ball sampling by distributing questionnaire forms and direct survey on the students' parents. The factors that motivate public participation to study in College, especially in the Tarbiyah Department, shows that college that specifically teaches Islamic studies becomes a major consideration as well as magnet for individuals to study in the college level. The consideration to do the religious orders and becoming a scholar of Islamic education is the highest motivation than any other motivations. Factor of carrying out the obligations to learn Islamic studies and extended learning also becomes the most important factor. All of those factors are the spiritual religious motivation portraits.

Keywords: *motivation, spiritual, participation, higher education*

A. Pendahuluan

Insan pembelajar, khususnya di lembaga pendidikan Islam tidak akan lekang dari nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi keagamaan itu nampak jelas menjadi pertimbangan utama seseorang menentukan pilihan untuk belajar atau mengajar di suatu lembaga pendidikan Islam, misalnya nilai spiritual-transendental dan nilai mendapat keberkahan (Kisbiyanto 2013:238). Pendidikan di era globalisasi mempunyai tantangan dan kendalanya tersendiri, misalnya gejala bebas nilai, sekot-sekat dunia yang hampir tak terbatas karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pergaulan antar manusia maupun antar bangsa yang semakin terbuka. masyarakat, terutama warga muslim yang taat beragama, tentu berpikir dalam memilih dan menentukan lembaga pendidikan bagi anak-anaknya, karena mereka setidaknya waspada, atau setidaknya mempunyai kekhawatiran atas masa depan kehidupan umat beragama di tengah-tengah percaturan dunia global

tersebut. Pemikiran sebagai landasan menentukan pilihan lembaga pendidikan itu bisa saja mengalami pasang surut, apakah lembaga pendidikan Islam benar-benar menjamin harapan-harapan mereka, atau sebaliknya. Demikian juga, masyarakat mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memilih pendidikan tinggi keagamaan Islam, sebagai tempat belajar di jenjang kesarjanaan.

Visi suatu perguruan tinggi pendidikan Islam menunjukkan idealisme dan cita-cita yang akan dinyatakan dalam serangkaian proses panjang menuju pencapaiannya. Visi yang baik adalah visi yang terukur dan teramati secara rasional-kontekstual, bukan secara matematik, dan bukan pula idealisme yang bebas dari konteks ruang dan waktu. Visi program studi pendidikan agama Islam masa lalu mungkin cukup hanya ditulis dengan kata “menyiapkan sarjana profesional di bidang pendidikan agama Islam”, meskipun rumusan seperti itu tidak salah. Kecukupan suatu rumusan visi di zaman kontemporer ini harus menyesuaikan beberapa aspek, antara lain adalah kontekstualisasi dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan ilmu dan pengetahuan di bidang keguruan agama Islam, dan kontekstualisasi dengan perkembangan di bidang lainnya, misalnya perkembangan teknologi, perkembangan politik, perkembangan budaya, dan tentunya perkembangan globalisasi.

Visi penyelenggara pendidikan bagi guru agama Islam masa kini, bisa dirumuskan misalnya “unggul dalam bidang keguruan dan kependidikan Islam di kawasan Asia Tenggara” atau “unggul dalam pemikiran, keguruan, dan manajemen pendidikan Islam di kawasan asia”, atau “unggul secara internasional dalam pendidikan dan keguruan Islam”, atau semacamnya. Unsur-unsur keunggulan, bidang pendidikan Islam, serta keduniaan merupakan unsur penting bagi perumusan visi kontemporer yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Indonesia bukan lagi dipahami sebagai lingkup kecil di kawasan nusantara, dari Sabang sampai Merauke, tetapi Indonesia adalah kawasan yang menyatu padu dengan masyarakat asia tenggara, lebih luasnya masyarakat asia bahkan masyarakat dunia. Indonesia di kawasan asia tenggara sudah menjadi ikon penting perkembangan Islam. Jadi pendidikan

agama Islam di Indonesia merupakan pendidikan yang sudah teruji keberhasilannya.

Pendidikan agama Islam di Indonesia bukan hanya sebagai aktifitas dakwah agama Islam, tetapi pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses akulturasi dan pembudayaan kemanusiaan. Pendidikan agama Islam bukan hanya mengajarkan dasar-dasar keislaman melalui ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mengajarkan cara-cara berbangsa, bernegara, berdemokrasi, bertoleransi dengan nonmuslim, menebarkan perdamaian dengan semua orang, dan kegotongroyongan sebagai nilai kebersamaan dalam tolong menolong. Pertautan antara misi agama dan misi budaya itu terus dikuatkan dalam semua proses pendidikan agama Islam di semua sekolah, mulai TK/RA, SD/SMP, SMA/SMK/MA, dan PTKIN di seluruh pelosok Indonesia.

Islam dalam kancan internasional sekarang ini mengalami isu *islamophobia*, yaitu suatu prasangka, ketakutan dan kebencian terhadap Islam yang menjadi gerakan anti-Islam berserta hal-hal yang terkait misalnya kehidupan muslim, budaya Islam, negara yang banyak berpenduduk muslim, dan semua yang terkait simbol keislaman. Perdebatan tentang *islamophobia* memang selalu terjadi sepanjang zaman, tetapi isu ini menguat dengan sangat tajam pasca tragedi serangan 11 September 2001 di World Trade Center (WTC) New York Amerika Serikat yang menggemparkan dunia. Tentu tidak ada hubungan langsung antara pendidikan Islam dan tragedi tersebut, tetapi ada hal-hal yang perlu mendapat kajian dan perhatian lebih mendalam tentang Islam dan perdamaian, dan terutama antara Islam, anti-kekerasan dan anti- terorisme.

Sebab citra negatif dan *prejudice* negatif bahwa Islam itu identik dengan terorisme memang seperti perdebatan tentang telur dan ayam, atau ayam dan telur yang bisa saling menjadi sebab dan bisa saling menjadi akibat. Bangsa barat di Eropa dan Amerika Serikat, umumnya berpikir logis dan realistis bahwa kasus-kasus kekerasan dan terorisme itu melibatkan orang atau kelompok muslim. Kenyataannya, kelompok garis keras Islam memang nyata adanya, meskipun jumlah mereka sangat kecil, tetapi karena bersifat keras, menyerang, dan destruktif sehingga nampak besar dan seakan-akan mewakili mayoritas Islam. Sebelumnya, dunia

ditakuti dengan isu tentang gerakan *jama'ah islamiyah* (JI), dan sekarang *Islamic State of Irak and Syiria* (ISIS).

Islam mempunyai tantangan yang sangat besar berkaitan dengan citra diri dan krisis kemanusiaan yang selama ini dimainkan oleh para dai-dai muslim garis keras. Tak terkecuali bidang pendidikan, sebagai bagian sistem agama Islam, pendidikan Islam mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pendidikan agama Islam itu *clear and clean* dari nilai-nilai kekerasan. Kurikulum dan semua *content* dari materi pembelajaran dalam pendidikan Islam harus benar-benar terbebas dari wacana dan pemahaman yang membolehkan kekerasan dalam berdakwah dan membela agama Islam. Selanjutnya, sistem pembelajaran juga harus didesain sedemikian rupa yang sarat dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kedamaian, toleransi, namun tetap jelas nilai-nilai aqidah dan syariat Islam. Tantangan terbesar umat muslim, termasuk sistem pendidikannya adalah cara menyampaikan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, dengan tetap menunjukkan ketegasan kepada musuh, tetapi mengasihnyai kepada mereka (*asyiddau 'alal kuffar wa ruhama' bainahum*).

Angka partisipasi keikutsertaan pendidikan tinggi, baik di universitas, institut sekolah tinggi, politeknik, ataupun akademi mencapai sekitar 11 %. Jadi hanya minoritas kecil saja penduduk Indonesia yang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi. Mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah belajar di perguruan tinggi. Tentu saja, hal ini menjadi suatu masalah dan kendala besar dalam bidang sumber daya manusia. Karena itu, banyak lembaga-lembaga internasional yang memberikan ranking kurang baik kepada Indonesia dalam bidang indeks kualitas sumber daya manusia. Hal ini wajar, karena faktor utama peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan. Jika partisipasi pendidikan tingkat perguruan tinggi masih rendah, tentu akan mempengaruhi kualitas dan kapasitas manusia Indonesia dalam bersikap, berperilaku, dan bekerja.

Kiat untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi selalu diupayakan, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Indonesia memang cukup berhasil dalam mencapai kelulusan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, namun masih

mempunyai pekerjaan rumah khususnya di tingkat SMA/SMK/MA, serta perguruan tinggi. Program-program yang menguatkan semangat warga negara untuk belajar dengan tekun dan berhasil di tingkat SMA/SMK/MA, serta perguruan tinggi harus semakin diperbanyak dan diprioritaskan. Wajib belajar 12 tahun hingga minimal SLTA merupakan program sangat penting. Pendidikan tinggi juga harus semakin meningkatkan keteraksesannya oleh para calon mahasiswa, agar mereka mendapat kemudahan untuk kuliah di perguruan tinggi. Program pemberian beasiswa untuk mahasiswa merupakan salah satu dari upaya peningkatan pendidikan tinggi yang relevan dan diminati oleh peserta pendidikan.

Upaya lain untuk memacu masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi adalah melalui kebijakan-kebijakan. Antara lain, pemerintah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi dan kualifikasi sarjana. Maka, warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri harus mempersiapkan dirinya menjadi sarjana lebih dahulu. Bahkan, beberapa formasi CPNS di Indonesia itu mensyaratkan gelar magister atau S2, misalnya formasi dosen dan peneliti. Demikian juga syarat untuk menjadi guru harus seorang sarjana. Guru negeri maupun guru swasta harus mempunyai kualifikasi sarjana/atau diploma empat. Semua jenjang keguruan, baik guru TK/RA, guru SD/MI, guru SMP/MTs, guru SMA/SMK/MA harus seorang sarjana. Guru masa lalu cukup menempuh pendidikan SLTA, misalnya sekolah pendidikan guru (SPG), sekolah guru olahraga (SGO), pendidikan guru agama (PGA), atau diploma dua saja. Seiring dengan diberlakukannya perundangan tentang guru dan dosen, maka semua guru dari jenjang terendah sampai SLTA harus memiliki kualifikasi sarjana, dan semua dosen harus minimal magister. Demikian juga sistem kebijakan di sektor swasta, misalnya menjadi wartawan, karyawan di perusahaan, dan sebagainya mensyaratkan pendidikan kesarjanaan. Banyaknya syarat profesi dan pekerjaan yang mencantumkan gelar kesarjanaan itu akan mendorong warga masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Hal yang sama juga diterapkan di berbagai sektor nonformal, misalnya lembaga kursus dan pondok pesantren serta madrasah diniyah. Beberapa

lembaga itu juga mensyaratkan pendidik yang telah meraih gelas sarjana. Dengan demikian, pendidikan kesarjaan itu bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Perubahan dunia kerja yang menuntut persyaratan formal maupun kompetensi yang memadai menjadikan pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan warga masyarakat juga harus mengakses pendidikan sampai tingkat tertinggi, bukan hanya pada tingkat SLTA, tetapi sampai lulus dari perguruan tinggi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak hanya ditunjukkan oleh kompetensinya, tetapi derajat pendidikan juga biasanya berhubungan dengan besarnya kompetensi yang dimiliki seseorang. Ukuran makronya, semakin banyak sarjana di Indonesia, maka tenaga ahli dan terampil akan semakin banyak tersedia. Itulah kemajuan pendidikan.

Dari latar belakang di atas, menjadikan penelitian ini terfokus pada tema kajian tentang arti pentingnya masyarakat muslim mempercayakan pendidikan anaknya pada lembaga pendidikan Islam, sehingga kajian ini berjudul Partisipasi masyarakat Mengikuti Pendidikan di PTKIN (Studi tentang Motivasi Spiritual Keagamaan), yang terfokus pada (1) Bagaimanakah motivasi masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya belajar di perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi kesadaran masyarakat mengikutsertakan anak mereka kuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam pelaksanaannya bukan dimaksudkan untuk menguji suatu teori, tetapi untuk mengungkapkan fenomena dan realitas melalui data-data melalui angket yang dikuatkan dengan wawancara terhadap responden. Data-data spesifik dicari maknanya untuk membuat kesimpulan yang general dari makna-makna yang diperoleh dari data-data tersebut.

B. Pembahasan

Sebelum membahas tentang dunia pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu kita kenali bahwa lembaga pendidikan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masyarakat serta partisipasinya. Dua hal yang saling terkait ini merupakan salah satu unsur yang menentukan apakah lembaga tersebut layak bahkan maju tidaknya juga diukur dari tingkat partisipasi dari masyarakat tersebut. Menurut Yulius S, (1984:171) menerangkan terkait apa itu partisipasi masyarakat, bahwa Partisipasi adalah sebuah tindakan keikutsertaan untuk mengambil bagian atau peran, berpartisipasi, ikut serta, ikut mengambil bagian”. Sebagai barometer akan adanya peran atau partisipasi tersebut dilihat dari animo masyarakat mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah/ kuantitasnya. Apabila kuantitas seorang yang mengikuti sesuatu meningkat atau banyak maka bisa dipastikan angka partisipasinya meningkat. Begitupula sebaliknya.

Tentunya dalam hal ini, PTKIN tidak bisa lepas dari yang namanya kelompok masyarakat. Dikarenakan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan jasa pendidikan tersebut. masyarakat dalam hal ini tentunya masyarakat muslim, yaitu sekelompok atau sekumpulan kelompok-kelompok yang beragama Islam yang mendiami suatu daerah tertentu(Nor Syam, 1984:47).

Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sementara itu PTKIN yang juga bisa disebut Perguruan Tinggi Agama Negeri adalah perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh kementerian Agama. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam yang mana dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam (Uhbiyati,1999:13).

Realitanya, keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi keagamaan islam lambat laun semakin meningkat, hal ini didukung dengan peta geografis wilayah yang mayoritas daerah kudu dan sekitarnya dihuni oleh masyarakat muslim. Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat ini tentunya ada dasar yang menjiwai semangat atau motivasi tersendiri dalam keikutsertaannya belajar di PTKIN. Salah satu dasar pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini adalah Dasar agama atau religious. Dasar agama atau religious ini merupakan dasar yang bersumber langsung dari ajaran-ajaran agama islam yang ada dalam pedomannya yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist. Zuhairini (1983:23) menuturkan dalam hal ini agama yang berasal dari ajaran Islam yakni Al-Qur'an maupun Al-Hadits menjadi modal utama motivasi spiritual yang mendorong masyarakat tertentu dalam upayanya ikut meningkatkan kualitas pendidikan islam dalam hal ini PTKIN.

Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan Islam di PTKIN adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah dalam keterlibatannya baik secara emosional ataupun fisik sehingga menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap lembaga pendidikan tersebut dengan ditandainya melalui peningkatan jumlah animo.

Suatu bangsa dan negara mempunyai visi kebangsaannya, termasuk visi pendidikan bagi warga negaranya. Tujuan umum pendidikan tercermin dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan rumusan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan yang dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah* itu merupakan derivasi dari kata *rabb* seperti dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Fatihah, dengan *rabb al-'alamin* yang berarti Allah sebagai Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam. Allah memberikan informasi tentang arti penting perencanaan, penertiban, dan peningkatan kualitas alam. Manusia diharapkan selalu memuji kepada Tuhan yang mendidik alam semesta karenanya manusia juga harus terdidik agar memiliki kemampuan untuk memahami alam yang telah dididik oleh Allah sekaligus mampu mendekatkan diri kepada Allah Sang Pendidik Sejati. Sebagai makhluk Tuhan, manusia idealnya melakukan internalisasi secara kontinu (*istiqamah*) terhadap nilai-nilai *ilahiyah* agar mencapai derajat *insan kamil* (manusia paripurna) sesuai dengan kehendak Allah SWT (Roqib, 2009:14).

Makna pendidikan Islam atau *tarbiyah*, secara terminologi, para ahli pendidikan Islam telah memformulasi pengertian pendidikan Islam, misalnya *tarbiyah* menurut berbagai ahli yang dijelaskan oleh Nizar (2002:32), al-Syaibaniy mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*). Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Menurut Roqib (2009:14-15) pendidikan dalam konteks ini terkait dengan gerak dinamis, positif, dan kontinu setiap individu menuju idealitas kehidupan manusia agar mendapatkan nilai terpuji. Aktivitas individu tersebut meliputi pengembangan kecerdasan pikir (rasio, kognitif), *dzikir* (afektif, rasa, hati, spiritual), dan keterampilan fisik (psikomotorik). Ilmu pendidikan berisi tentang teori pendidikan sekaligus data dan penjelasan yang mendukung teori tersebut. Dengan demikian, ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori kependidikan yang didasarkan pada konsep dasar Islam yang diambil dari penelaahan terhadap Al-Qur'an, hadits, dan teori keilmuan lain, yang ditelaah dan dikonstruksi secara integratif oleh intelektual muslim untuk menjadi sebuah bangunan teori-teori kependidikan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Upaya dakwah dan pembinaan umat muslim melalui jalur pendidikan, Kementerian Agama RI mempunyai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dirjen Pendidikan Islam mempunyai direktorat, antara lain yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dan Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Sampai saat ini, Kementerian Agama RI membina dan menyelenggarakan pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan Islam, meliputi Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang terdiri dari Universitas Negeri Islam (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 memberikan ruang lingkup yang luas pada aspek pembedaan ilmu dan gelar akademik. PMA ini juga memberi kepastian regulasi khususnya bagi Universitas Islam Negeri (UIN) yang bisa membuka semua program studi sesuai kemampuannya.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang masih terbatas oleh kajian keislaman (*islamic studies*), tentu saja membatasi diri akan batas wilayah kajian yang ditekuni dan dikembangkan sesuai statusnya sebagai institut dan sekolah tinggi bidang agama Islam. Demikian pula halnya dengan fakultas atau jurusan tarbiyah yang mempunyai batas kajian pada bidang pendidikan Islam.

Tabel 1

Program Studi, Kesarjajaan, dan Gelar
sesuai PMA Nomor 33 Tahun 2016

No	Program Studi	Kesarjajaan	Gelar
1	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
2	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
3	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6	Bimbingan dan Konseling Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7	Tadris Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Tadris IPA	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10	Tadris IPS	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
11	Tadris Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
12	Tadris Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
13	Tadris Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
14	Tadris Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

Fakultas/atau jurusan tarbiyah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik calon guru, mempunyai peran penting, terutama untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang bermutu dewasa ini. Berkaitan dengan pengembangan program studi pada Jurusan Tarbiyah, ada dua strategi : (1) meningkatkan

mutu (*quality improvement*) pendidikan program studi PAI, PBA, PGMI, PIAUD, dan beberapa tadrīs sebagaimana yang telah dibuka di PTKIN dan (2) membuka program studi yang benar-benar baru yang dibutuhkan dunia pendidikan terutama oleh RA, MI, MTs dan MA. Bahkan mungkin juga perlu dibuka program studi guru pendidikan non-formal untuk sanggar kegiatan belajar (SKB), sekolah terbuka dan pondok pesantren.

Pengembangan program studi di tarbiyah masih terus dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa pendidikan tinggi bidang kependidikan dan keguruan. Jumlah sarjana Tarbiyah yang besar itu mempunyai kekuatan moral dan politik yang besar jika ada suatu konsolidasi keilmuan maupun profesi yang menaunginya. Sarjana Tarbiyah bisa belajar kepada pengalaman yang ditepuh oleh sarjana Syari'ah sehingga bisa menjadi profesional di bidang hukum, baik sebagai hakim, panitera, advokat, maupun penasehat hukum sebagaimana sarjana hukum pada umumnya. Sarjana Tarbiyah juga seharusnya mempunyai manajemen pengembangan keprofesionalitasnya sehingga mereka bisa mendapatkan pengakuan profesi, mengembangkan bidang-bidang profesinya, serta memperjuangkan hak-hak profesinya dari masa ke masa.

Profesionalisasi pendidik sekarang ini jelas tampak pada sistem dan regulasi yang berlaku di negara ini. Pendidik di sekolah formal adalah seorang sarjana atau yang sederajat, misalnya pendidikan Diploma IV. Guru yang bertugas sebagai pembimbing dan pengajar di suatu lembaga pendidikan merupakan profesi yang diidamkan oleh sebagian besar sarjana Tarbiyah. Berpikir seperti itu merupakan hal yang normal dan masuk akal. Kenyataannya, sebagian besar pendidik di sekolah merupakan alumni dari fakultas keguruan/atau tarbiyah. Organisasi profesi guru memang sudah berdiri di Indonesia, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang dalam sejarahnya telah menorehkan banyak jasa, antara lain undang-undang tentang guru dan dosen. Keberhasilan perjuangan guru melalui PGRI itu telah melahirkan Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Perjuangan guru melalui jalur legal perundangan itu disambut dengan baik oleh Pemerintah melalui Presiden maupun legislatif di DPR RI.

Setelah diundangkannya Undang-Undang RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah telah banyak melangkah untuk peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai upaya asosiasi dan kelompok strategis guru bergerak sedemikian rupa sehingga menjadi reformasi pendidikan di Indonesia. Sekurangnya, sudah ada tiga perundangan di bidang pendidikan yang berlaku di Indonesia, selain dua yang disebut tadi, yaitu Undang-Undang RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sarjana alumni dari Tarbiyah juga banyak yang mengabdikan diri sebagai tenaga kependidikan di lembaga pendidikan, biasanya menjadi pegawai administrasi. Namun satuan profesi mereka belum bisa disebut jelas dalam sistem perundangan dibidang pendidikan. Sebagai pegawai yang melayani urusan administrasi sekolah, mereka benar-benar dituntut kemampuannya di bidang tata usaha sekolah, termasuk memberikan layanan teknis lainnya. Ada perkembangan menarik, bahwa sarjana Tarbiyah yang bekerja sebagai tenaga administrasi itu mengabdikan selamam beberapa tahun, dan akhirnya mereka juga mendapat kesempatan untuk menjadi pendidik. Seiring dengan waktu, loyalitas dalam pengabdian, dan kemampuan yang mulai tampak, maka sarjana-sarjana itu dipercaya oleh sekolah untuk berpindah profesi sebagai pendidik. Fenomena ini sering terjadi, karena keterbatasan kuota pendidik sehingga pada suatu saat ada guru yang pindah tugas atau pensiun, maka mereka diangkat sebagai guru yang mengganti dan melanjutkannya. Tenaga kependidikan sebenarnya tidak hanya berperan dalam pelayanan tata usaha atau administrasi saja, melainkan bisa berperan di bidang lainnya, misalnya sebagai pustakawan, laboran, pelatih, dan teknisi di sekolah.

Pustakawan sekolah merupakan tugas keilmuan yang membutuhkan tenaga profesional, sekurangnya orang yang mengerti tentang buku dan ilmu pengetahuan. Sarjana pendidikan sangat relevan untuk menjadi pustakawan sekolah, apalagi sekolah-sekolah di Indonesia umumnya tidak mempunyai pustakawan. Pustakawan sekolah juga mendapat pelatihan khusus tentang ilmu keperpustakaan untuk menunjang tugas-tugas utamanya.

Laboran merupakan tenaga dengan kemampuan khusus di bidang penyelenggaraan laboratorium sebagai pembelajaran praktik peserta didik. Tugas utama laboran adalah memberikan bantuan penggunaan laboratorium untuk praktikum peserta didik. Pelatih di sekolah merupakan tenaga kependidikan yang membantu pendidik utama, yaitu memberikan pelatihan kepada peserta didik di berbagai bidang, misalnya kepramukaan, olahraga, kesenian, kepemimpinan, dan bakat minat lainnya.

Sarjana Tarbiyah memiliki kompetensi baik dalam bidang ilmu pendidikan dan psikologi anak, sangat relevan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik di sekolah. Sarjana Tarbiyah juga mempunyai kelebihan di bidang penguasaan ilmu keagamaan, sehingga bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus di bidang keagamaan, misalnya keterampilan membaca (tartil) al-Qur'an, seni baca al-Qur'an, seni kaligrafi, seni musik islami seperti nasyid, rebana, dan qasidah. Teknisi merupakan seorang yang bertugas utama dalam pemeliharaan dan penyediaan peralatan pembelajaran dan layanan administrasi lainnya. Misalnya teknisi di bidang komputer, peralatan laboratorium bahasa, peralatan laboratorium IPA, IPS, dan sebagainya. Teknisi bertanggung jawab dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan sekolah itu agar tetap baik dan setiap saat siap dipakai untuk menunjang proses pembelajaran.

Berbagai kebijakan dalam mengembangkan mutu pendidikan tenaga keguruan dan kependidikan selalu dikaji, digagas dan dicanangkan. Bahkan dewasa ini banyak ditekankan aspek kebijakan mutu tersebut, misalnya guru harus berpendidikan sarjana/S1, guru harus diuji sertifikasi (UU RI No. 14/2005), pelarangan perkuliahan kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu (SE DIKTI) bahkan perguruan tinggi sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk diakui sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Kebijakan-kebijakan itu sangat relevan dengan tuntutan mutu pendidikan nasional yang semakin diharapkan untuk maju secara progresif.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Yang

dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Jadi yang dimaksud guru profesional adalah kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan guru untuk mendidihkan ilmu pengetahuan itu kepada peserta didiknya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin keilmuan yang ditekuni sebagai spesifikasi dan keahliannya.

Menurut Oemar Hamalik (2002:38), karakter kompetensi guru adalah : (1) guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, (2) guru mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil, (3) guru mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah dan (4) guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas. Kemampuan dasar seorang guru, sebagaimana dijelaskan Oemar Hamalik (2002:44-45), yaitu meliputi : (1) Menguasai bahan, yakni menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi, (2) Mengelola program belajar mengajar yakni merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan bisa menggunakan metode mengajar, memilih materi dan prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar dan mengajar, mengenal kemampuan anak didik, menyesuaikan rencana dengan situasi kelas, merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial, serta mengevaluasi hasil belajar, (3) Mengelola kelas, yakni mengatur tata ruang kelas dalam rangka cara belajar siswa aktif dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif, (4) menggunakan media, yakni

memilih dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan, mengelola, mengembangkan laboratorium, serta menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, (5) menguasai landasan kependidikan, (6) merencanakan program pengajaran, (7) mengelola interaksi belajar mengajar, (8) menguasai macam-macam metode mengajar, (9) menilai kemampuan prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (10) mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (11) mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, dan (12) mampu memahami dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan yang sederhana guna kemajuan pengajaran.

Danim (2002 : 32) menjelaskan bahwa guru yang profesional harus menguasai 10 kompetensi guru, yaitu menguasai bahan pelajaran, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Untuk melihat tingkat kemampuan profesional guru setidaknya bisa dilihat dari dua aspek (Danim 2002 : 30), *pertama*, dilihat dari tingkat pendidikan minimal untuk jenjang sekolah tempat guru mengajar, dan *kedua*, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lainnya.

Windam dalam Danim (2002 : 31) mengklasifikasikan derajat mutu tenaga kependidikan menjadi tiga kategori, yaitu berkualitas penuh (*qualified*), berkualifikasi sebagian (*underqualified*) dan tidak memenuhi kualifikasi (*unqualified*) sebagaimana dikemukakan : (1) *Qualified, possessing the academic and teacher training attainment appropriate the assigned level and type of teaching.* (2) *Underqualified, possessing the academic but not the teacher training appropriate to the level of assignment.* (3) *Unqualified, possessing neither the academic nor the teacher training attainment appropriate to the level of assignment.* Dengan

demikian, kemampuan profesional guru dapat dilihat dari aspek formal maupun substantifnya. Kemampuan formal menunjuk pada jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, sedangkan kemampuan profesional secara substantif adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun pendidikan formal guru Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA) dilihat dari jenjang pendidikan yang harus ditempuh adalah setingkat sarjana strata satu (S1). Bahkan menurut UU RI No. 14/2005, di samping guru harus berpendidikan S1, mereka juga akan mengikuti uji sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional.

Upaya peningkatan kompetensi profesional guru bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui berbagai macam pendidikan, pelatihan, seminar, diskusi, pemenuhan peralatan pengajaran dan sebagainya. Peningkatan kompetensi guru tersebut bertujuan untuk (Danim 2002): meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni guru, meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi ajar sehingga lambat laun guru semakin efektif dalam penguasaan metodologi dan praktik pembelajaran, meningkatkan citra dan *performance* guru sehingga guru sebagai pendidik tampil sebagai tenaga profesional dalam bidang pekerjaannya dan meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan guru karena dengan peningkatan kualitas guru, maka guru berhak mendapat penghargaan (*reward*) yang bertambah baik dari sebelumnya. Dengan peningkatan kompetensi profesional guru, pembelajaran di kelas juga semakin meningkat karena salah satu syarat menciptakan pembelajaran berkualitas adalah terpenuhinya faktor-faktor pembelajaran yang mendukung, salah satunya adalah kualitas profesional guru.

Hamalik (2002:103) berpendapat bahwa isi pendidikan guru dan hal-hal yang perlu diketahui oleh guru berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut: *pertama*, pengetahuan, keterampilan dan moral yang ada dalam kebudayaan harus diajarkan secara sistematis. Asumsi ini menuju ke konsep-konsep motivasi dan pengajaran, dan *kedua*, pertumbuhan alami

yang berkembang secara bebas tak dapat dipisahkan dari bakat individu. Asumsi ini berkenaan dengan konsep bahwa guru perlu bekerja hanya pada suasana, material dan kondisi yang relevan dengan individu yang bersangkutan.

Haberman sebagaimana rumusan Hamalik (2002:106) berpendapat bahwa pengetahuan guru paling tidak mengandung 12 komponen yang menggambarkan seorang guru yang baik, yaitu : keterampilan, etika, disiplin ilmiah, konsep-konsep dasar, pelajar/siswa, suasana sosial, belajar, pedagogik/metodologi pengajaran, proses, teknologi, pengembangan diri dan perubahan/inovasi.

Semiawan dalam kutipan Danim (2002: 31) mengklasifikasi tiga hirarki profesionalisme guru dilihat dari penjurangan dalam pendidikan guru, yaitu: (1) Tenaga profesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau yang setara, memiliki wewenang penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian pendidikan/pengajaran, (2) Tenaga semi-profesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan D3 atau yang setara, telah berwenang mengajar secara mandiri, tetapi masih harus berkonsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi jenjang profesionalnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian maupun pengendalian pengajaran, (3) Tenaga paraprofesional; merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan D2 ke bawah, yang memerlukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian pendidikan/pengajaran.

Secara umum, jenis pendidikan guru dalam pendidikan formal di Indonesia adalah pendidikan guru tingkat SPG/SGO/PGA, pendidikan guru tingkat Diploma II/Diploma III, pendidikan guru tingkat Diploma IV dan Sarjana S1, serta dilanjutkan pendidikan tingkat magister/S2 dan doktor/S3. Secara umum, pendidikan guru dibagi menjadi dua macam (Hamalik 2002), yaitu pendidikan (*education*) dan pelatihan (*training*). Pendidikan dimaksudkan untuk membekali guru dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan atau keterampilan utama sebagai guru sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk membekali

guru dalam kepentingan penguasaan suatu kemampuan teknis operasional atau keterampilan teknis tertentu untuk mendukung tugas utamanya dalam mengajar. Pendidikan dilaksanakan lebih lama, sedangkan pelatihan dilaksanakan secara singkat sesuai dengan kebutuhan.

Guru agama Islam harus *'alim* dalam ilmu keislaman, guru Bahasa Arab harus pintar *qowaid* dan fasih berbahasa arab, guru Bahasa Inggris harus bisa berbicara bahasa Inggris, jangan sampai guru matematika, fisika, biologi, kimia tidak bisa melakukan percobaan dan sebagainya. Tarbiyah memperkaya bidang pendidikan keguruan dan kependidikannya, yaitu membuka program studi baru yang secara tegas harus dibuka di semua UIN/IAIN/STAIN, misalnya program studi pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan IPS, pendidikan ekonomi, pengembangan kurikulum, teknologi pendidikan, bimbingan konseling, manajemen pendidikan/administrasi pendidikan dan sebagainya. Terobosan ini sangat penting, jika dilihat dari aspek semangat penghilangan dikotomi ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan Islam, aspek spesifikasi dan keahlian para sarjana pendidikan Islam, dan peluang kerja lulusan yang tidak hanya pada guru PAI, Bahasa Arab, dan Tadris (yang sangat terbatas).

Tantangan program studi pada jurusan/fakultas Tarbiyah semakin jelas, karena bukan hanya bagaimana program studi yang telah ada harus dikelola secara baik, namun harus ada inovasi baru untuk menumbuhkembangkan peran Tarbiyah sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dengan memperbanyak program studi baru, baik yang sudah terakomodasi dalam PMA 33/2016 sebanyak 14 program studi, maupun prodi-prodi baru lainnya sesuai dengan kebutuhan penyiapan tenaga keguruan dan kependidikan di sekolah dan madrasah. Pendidikan merupakan mandat sosial untuk semua jenis manusia tanpa kecuali. Kebutuhan terhadap pendidikan sebagaimana kebutuhan terhadap sandang, papan, dan papan yang harus dipenuhi dan merupakan hak atas anak manusia. Orang dewasa, orang yang berkemampuan berkewajiban memberikan pendidikan kepada peserta didik, yaitu utamanya anak-anak dan remaja.

Pendidikan juga bukan hanya untuk dipenuhi secara formal, misalnya siswa dianggap baik jika nilai rapornya baik. Anak yang bisa menunjukkan nilai rapor bagus, memang dia bisa dikatakan sebagai anak berprestasi. Tapi itu hanya salah satu indikator formal. Indikator substantif jauh lebih penting untuk ditunjukkan. Formalisasi pendidikan telah mengantarkan bangsa Indonesia pada persimpangan kemanusiaan yang cukup mengkhawatirkan, bahkan lama-lama bisa membahayakan. Tentu kita tidak ingin mendapati lulusan ujian nasional hanya bisa mengerjakan soal pada waktu ujian nasional saja, tetapi menjadi anak cerdas yang berkemampuan selamanya. Tentu para juara olimpiade kita tidak boleh menjadi sang juara, tetapi miskin karya. Tentu kita tidak ingin alumni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan Perguruan Tinggi kita hanya lulus tanpa kehidupan yang sejahtera dan mensejahterakan. Keberhasilan pendidikan jangan hanya sekedar kamufase dengan indikasi formal semata. Sebagai contoh, agar pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam mencapai standar kompetensinya, maka pelaksanaan pembelajaran untuk delapan mata kuliah praktikum di STAIN Kudus, ditawarkan secara berurutan dari semester pertama hingga semester delapan. Urutannya, semester ke-1 praktikum bahasa Arab, semester ke-2 praktikum bahasa Inggris, semester ke-3 praktikum ibadah, semester ke-4 praktikum teknologi informasi pendidikan, semester ke-5 praktikum penelitian, semester ke-6 praktikum profesi/micro teaching, semester ke-7 praktik profesi lapangan, dan semester ke-8 kuliah kerja nyata (Kisbiyanto, 35).

Melihat dari pesatnya perkembangan Jurusan Tarbiyah sekaligus meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi di STAIN Kudus menjadi sebuah hal yang unik. Dari kajian ini didapatkan bahwa kebijaksanaan masyarakat dalam hal ini orang tua mahasiswa memasukkan anaknya di perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2

Pertimbangan Partisipasi masyarakat terhadap PTKIN

No	Kebijakan	Keterangan
1.	Pertimbangan tentang Kewajiban Menuntut Ilmu Menurut Agama	Tinggi
2.	Pertimbangan tentang Kewajiban Belajar agar Menjadi Bangsa Cerdas	Sedang
3.	Pertimbangan tentang Pentingnya Menjadi Sarjana Yang Bermanfaat	Sedang
4.	Pertimbangan agar Menjadi Sarjana Pendidikan Islam	Sedang
5.	Pertimbangan agar Menjadi Guru	Tinggi
6.	Pertimbangan agar Menjadi Pegawai Negeri/Pegawai Pemerintah	Tinggi
7.	Pertimbangan agar menjadi orang berilmu dan berguna	Tinggi

Selain pertimbangan diatas, didapatkan beberapa faktor yang menjadi kesadaran masyarakat sehingga ada peningkatan yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat mengikutsertakan anak mereka kuliah di perguruan tinggi di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, faktor tersebut sebagai berikut:

Tabel 3

Faktor-faktor Peningkatan Partisipasi masyarakat

No	Faktor	Keterangan
1.	Melaksanakan Perintah Agama untuk Belajar Setinggi-tingginya	Tinggi
2.	Melaksanakan Perintah Guru untuk Kuliah	Sedang
3.	Melaksanakan Perintah Orang Tua agar Menjadi Sarjana	Tinggi
4.	Kebersamaan dengan Teman Yang Ingin Kuliah	Sedang
5.	Perguruan Tinggi Dekat dengan Tempat Tinggal	Sedang
6.	Biaya Perkuliahan Yang Murah/atau Terjangkau	Tinggi
7.	Mendapat Beasiswa di Perguruan Tinggi	Tinggi

Dari paparan data diatas dikuatkan oleh wawancara terhadap beberapa responden, salah satunya Yanto orang tua dari mahasiswa misalnya menyekolahkan anaknya jelas-jelas dengan pertimbangan spiritual keagamaan, dimana belajar agama dimaksudkan untuk menjadi orang baik yang taat kepada Allah dalam menjalankan syaria'at agama Islam. Demikian juga Subiyati salah satu orang tua mahasiswa yang secara tegas menyekolahkan semua anaknya untuk belajar agama Islam, baik di madrasah maupun di perguruan tinggi agama Islam. Di samping sebagian orang tua itu juga mempunyai pertimbangan lainnya, yaitu tentang agar anak mereka menjadi guru agama Islam yang akan bekerja sebagai guru yang mengajar ilmu-ilmu agama Islam. Hal itu yang diungkapkan Aditya dan beberapa responden lainnya.

Pandangan yang sangat kuat bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban agama, hal tersebut tertanam dalam hati anak sehingga perintah orangtua menjadi penentu arah dimana anak belajar. Dalam hal ini anak-anak memahami ketaatan kepada orangtua akan memberikan keberkahan tersendiri terhadap karir hidupnya. Selain hal tersebut dikarenakan daerah pantura secara sosio historis sangat kental akan nilai-nilai agama sehingga motivasi spiritual baik dari orang tua maupun anak sangat tinggi terhadap pendidikan Islam.

C. Simpulan

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan PTKIN Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus tidak bisa lepas dari peran dan partisipasi masyarakat. masyarakat pengguna pendidikan tinggi keagamaan Islam, khususnya yang menjadi orang tua/wali mahasiswa mempunyai pertimbangan spiritual keagamaan, sekurangnya bisa dilihat dari kecenderungan bahwa mempelajari ilmu-ilmu agama Islam dianggap sangat penting bagi anak-anak mereka. Biasanya karena para orang tua mahasiswa itu mempunyai pengalaman belajar di pesantren atau madrasah. Mereka juga termotivasi oleh keberadaan para sarjana pendidikan Islam yang sudah mempunyai peran dan kiprah di masyarakat.

Beberapa hal yang mendasari munculnya motivasi spiritual terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat tersebut adalah pertimbangan keagamaan yang bernilai spiritual sehingga menjadi pertimbangan yang bernilai tinggi. karena pertimbangan perintah agama, menjadi orang berilmu dan berguna dalam kategori rendah, menjadi sarjana pendidikan Islam, menjadi guru, dan agar menjadi pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dalam kategori tinggi; kebijaksanaan agar menjadi bangsa yang cerdas dan menjadi sarjana yang bermanfaat dalam kategori sedang;

Selain data diatas, beberapa faktor-faktor yang menjadi kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, khususnya di Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus adalah faktor melaksanakan perintah agama untuk belajar setinggi-tingginya, melaksanakan perintah orang tua agar menjadi sarjana, kebersamaan dengan teman yang ingin kuliah, biaya perkuliahan yang murah/atau terjangkau, dan mendapat beasiswa di perguruan tinggi dalam kategori tinggi; Sedangkan melaksanakan perintah guru untuk kuliah, dan perguruan tinggi dekat dengan tempat tinggal dalam kategori sedang.

Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pengelola pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, serta para pengelola perguruan tinggi pada umumnya agar selalu meningkatkan layanan dan mutu pendidikan agar masyarakat tertarik untuk menyekolahkan anak-anak mereka di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini, agar menjadi perhatian dan kajian bagi semua pihak, khususnya pengelola Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus dan pendidikan tinggi pada umumnya. Penelitian dengan tema dan fokus yang serumpun teman ini lainnya terus dilakukan untuk memperkaya pengembangan kajian dan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulius S, et.al, 1984. *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Noor Syam. Mohammad, 1984. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Uhbiyati. Nur, 1999, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zuhairini, et.al., 1983, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kisbiyanto. 2013. Organizational Behavior Model At Madrasah Diniyah In Kudus Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*. Vol. 1, No. 2.
- Kisbiyanto. 2013. Studi Analisis Pengelolaan Praktikum Keagamaan Islam (Perspektif Kurikulum). *Jurnal Thufula*. Vol. 1. No. 1.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Rofiq, Moh. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan masyarakat*. Yogyakarta: LKiS.
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

